

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Literatur pertama yang digunakan oleh penulis yaitu Artikel yang ditulis oleh Raj Verma yang berjudul “India-China rivalry, border dispute, border standoffs, and crises” Dalam artikelnya yang diterbitkan tahun 2024. Penulis meneliti tentang Sengketa perbatasan antara India dan China telah menjadi fokus perhatian ilmiah, dengan China menggunakan taktik untuk memperluas wilayahnya secara bertahap tanpa memicu konflik terbuka. Strategi ini telah berlangsung hampir tujuh dekade, mengarah pada serangan sporadis di sepanjang Garis Kontrol Aktual (LAC) dan menciptakan tantangan strategis jangka panjang bagi India. Bentrokan Lembah Galwan pada 2020 menandai eskalasi ketegangan yang signifikan, dipicu oleh penumpukan militer China dan pembangunan infrastruktur oleh India di perbatasan yang dianggap sebagai ancaman oleh Beijing. Selain itu, perubahan status Jammu dan Kashmir oleh India telah memperburuk ketegangan Tiongkok. Dalam merespon tantangan ini, para sarjana India telah menyarankan peningkatan kemampuan pencegahan India, termasuk peningkatan belanja militer, pengembangan industri pertahanan domestik, dan pergeseran fokus ke kekuatan udara. Literatur juga mencatat bahwa strategi pencegahan India yang lama, seperti "pencegahan dengan penolakan," kini tidak lagi efektif dan membutuhkan evaluasi ulang. Secara keseluruhan, hubungan India-China mencerminkan kombinasi keluhan historis, perhitungan strategis, dan dinamika geopolitik yang terus berkembang, yang penting dipahami oleh pembuat kebijakan dan akademisi.

Literatur kedua merupakan jurnal artikel yang ditulis oleh Rully Agung Afrizal dan Achmad Hariri yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wilayah Bagi Kedaulatan Teritorial India atas Klaim Sepihak oleh Tiongkok” Dalam artikelnya yang diterbitkan tahun 2023. Penulis meneliti tentang perselisihan teritorial, terutama antara China dan India, mengungkapkan interaksi kompleks dari keluhan historis, kerangka hukum, dan jalur potensial untuk penyelesaian. Konteks sejarah sangat penting, karena konflik berakar kuat pada warisan kolonial dan perjanjian seperti Garis McMahon, yang dibantah China, mengklaim bagian Arunachal

Pradesh sebagai wilayahnya. Latar belakang sejarah ini menetapkan panggung untuk ketegangan yang sedang berlangsung dan konfrontasi militer, seperti yang terlihat dalam Perang Sino-India tahun 1962 dan pertempuran berikutnya di sepanjang Garis Kontrol Aktual (LAC). Artikel ini menekankan tantangan dalam menyelesaikan perselisihan ini, termasuk sentimen nasionalistik yang mengakar dan kurangnya saling percaya, yang mempersulit upaya diplomatik. Selanjutnya, peran organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, disorot sebagai mediator potensial, meskipun efektivitas intervensi semacam itu sering dipertanyakan karena dinamika politik dalam Dewan Keamanan. Metode yang tidak mengikat secara hukum, seperti mediasi dan negosiasi melalui badan-badan seperti Mahkamah Internasional (ICJ), disarankan sebagai opsi yang layak untuk resolusi konflik, menekankan perlunya pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah lama ini. Secara keseluruhan, literatur menggarisbawahi perlunya memahami konteks sejarah dan lanskap geopolitik untuk menavigasi kompleksitas perselisihan teritorial secara efektif.

Literatur Ketiga merupakan jurnal artikel yang ditulis oleh Yakop Tasik, Aria Aditya Setiawan, Margareth Dyah Anggraeni Widirahayu, Maulana Malik Saleh yang berjudul **“Sengketa Perbatasan Sino-India Dalam Kepentingan Geopolitik Tiongkok (Studi Kasus Terhadap Konflik Perbatasan Pada Line Of Actual Control Tahun 2020)”** Dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2023. Para penulis mengkaji kepentingan geopolitik China dalam sengketa perbatasan Tiongkok-India, terutama berfokus pada peristiwa seputar LAC pada tahun 2020. Ia berpendapat bahwa kurangnya demarkasi yang jelas dari LAC telah menyebabkan meningkatnya ketegangan dan konflik, karena kedua negara terlibat dalam pengembangan infrastruktur yang mengancam untuk mengubah status quo. Studi ini menggunakan Proyeksi Kekuatan dan Pendekatan Keamanan untuk menganalisis motivasi China, menyoroti signifikansi strategis Aksai Chin untuk pertahanan militer dan stabilitas regional. Temuan menunjukkan bahwa sengketa perbatasan yang sedang berlangsung tidak hanya teritorial tetapi sangat terkait dengan masalah keamanan nasional dan strategi geopolitik. Makalah ini menyimpulkan bahwa tanpa mekanisme resolusi formal, seperti arbitrase atau mediasi internasional, potensi konflik di masa depan tetap tinggi, karena kedua

negara terus menegaskan klaim mereka atas wilayah yang disengketakan. Analisis ini menggarisbawahi perlunya pemahaman komprehensif tentang konteks historis dan geopolitik untuk menavigasi kompleksitas sengketa perbatasan Tiongkok-India secara efektif.

Literatur Keempat merupakan sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Dinda Anindita dan Elisabeth Septin Puspoayu yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Negara Antara China dan India Di Line Of Actual Control Menurut Hukum Internasional”** Jurnal ini memberikan analisis mendalam tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional, dengan fokus pada sengketa perbatasan China-India di Line of Actual Control (LAC). Penulis mengeksplorasi kerangka hukum internasional, termasuk Piagam PBB, Pengadilan Internasional (ICJ), dan Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA), yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai melalui diplomasi, mediasi, dan arbitrase. Artikel ini juga mengulas konteks historis sengketa, terutama di wilayah Aksai Chin yang telah menjadi titik panas sejak Perang Sino-India 1962. Penulis menyoroti kontrol China atas Aksai Chin sebagai okupasi de facto yang melanggar hukum internasional, khususnya larangan akuisisi teritorial dengan kekerasan. Jurnal ini juga membahas upaya diplomatik sejak 1990-an dan peran organisasi internasional seperti PBB dalam mediasi. Penulis menekankan pentingnya saluran hukum dan negosiasi diplomatik untuk menyelesaikan konflik ini demi menjaga stabilitas regional. Kekuatan utama jurnal ini terletak pada penggabungan teori hukum dengan analisis kasus nyata, memberikan pemahaman menyeluruh tentang dimensi hukum dan geopolitik sengketa. Penyertaan konteks sejarah serta perkembangan terkini, seperti bentrokan perbatasan 2020, membuat analisis ini relevan dan tepat waktu. Namun, jurnal ini cenderung terlalu optimis dalam melihat efektivitas mekanisme hukum tanpa mempertimbangkan hambatan politik dan strategis yang seringkali menghalangi penerapannya, terutama dalam kasus yang melibatkan negara besar seperti China dan India. Selain itu, tidak ada pembahasan mendalam tentang dampak geopolitik sengketa ini, yang membatasi pemahaman tentang pengaruh kekuatan internasional, keamanan regional, dan nasionalisme dalam penyelesaian sengketa. Ketergantungan pada sumber sekunder tanpa data primer, seperti wawancara dengan pembuat kebijakan, juga mengurangi ketajaman empiris

analisis ini. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami sengketa perbatasan China-India, namun masih perlu memperdalam pembahasan tentang faktor geopolitik dan tantangan praktis dalam penerapan solusi hukum.

Literatur kelima adalah artikel jurnal yang berjudul **“The Case of the Ladakh Border and the Diplomatic Efforts of India China”** yang ditulis oleh Atiyah Hijriyanti. Jurnal ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai sengketa perbatasan antara India dan China, dengan fokus pada Ladakh. Artikel ini mencakup konteks sejarah, perkembangan terkini, dan upaya diplomatik, yang membantu pembaca memahami dinamika kompleks yang melatarbelakangi konflik ini. Penulis menguraikan aspek historis sengketa ini, mulai dari era kolonial dan Perang China-India 1962, yang masih berpengaruh hingga saat ini. Hal ini penting untuk memahami ketidakpercayaan yang menghalangi negosiasi. Selain itu, perkembangan terbaru, seperti pembangunan infrastruktur di sepanjang Garis Kendali Aktual (LAC) dan insiden seperti Lembah Galwan, menunjukkan bagaimana konflik terus berkembang. Jurnal ini juga menekankan pentingnya diplomasi untuk mencegah eskalasi menjadi perang terbuka, dengan menyoroti keseimbangan antara kekuatan militer dan dialog. Ini sejalan dengan prinsip keamanan internasional yang lebih luas, yang mendorong penyelesaian damai melalui pembicaraan. Penulis juga membahas tantangan dalam negosiasi, yang sering terhambat oleh rasa saling curiga dan perbedaan interpretasi hukum internasional. Namun, jurnal ini masih memiliki beberapa kekurangan. Meskipun memberikan gambaran sejarah dan strategi yang baik, kurang mendalam dalam membahas inisiatif diplomatik yang dilakukan kedua negara dan efektivitasnya. Analisis mengenai mediator pihak ketiga atau organisasi internasional bisa memperkaya diskusi. Selain itu, dampak sosio-ekonomi pada penduduk Ladakh dan daerah sekitarnya kurang diperhatikan, padahal ini penting untuk memahami penuh dampak konflik. Artikel ini juga dapat diperkuat dengan membahas kemungkinan jalur resolusi yang lebih konkret dan strategi kebijakan yang dapat memfasilitasi penyelesaian. Perspektif dari pemangku kepentingan regional dan aktor internasional dapat meningkatkan analisis. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan rangkuman yang informatif tentang sengketa perbatasan India-China

di Ladakh, dengan kekuatan pada konteks historis dan geopolitik. Meskipun demikian, artikel ini bisa lebih lengkap dengan analisis mendalam mengenai diplomasi, dampak sosial-ekonomi, dan jalur resolusi di masa depan.

Literatur keenam adalah artikel yang berjudul **“The Crisis after the Crisis: How Ladakh will Shape India’s Competition with China”** yang ditulis oleh Arzan Tarapore. Dalam artikelnya yang diterbitkan pada tahun 2021. Artikel ini membahas dinamika persaingan strategis antara India dan China setelah insiden perbatasan di Ladakh 2019-2020. Fokus utamanya penulis menyoroti bagaimana India mengubah strategi militernya, beralih dari pendekatan yang bersifat reaktif menjadi pendekatan berbasis penolakan, yang melibatkan peningkatan kemampuan pengawasan, desentralisasi struktur komando, dan penyempurnaan taktik untuk mencegah paksaan China tanpa meningkatkan konflik. Pendekatan ini dianggap lebih berkelanjutan dan hemat biaya untuk menjaga stabilitas, karena memberi tekanan politik pada China tanpa harus terlibat dalam tindakan balasan militer langsung. Artikel ini juga membahas biaya besar yang ditanggung India dalam memperkuat Garis Kontrol Aktual (LAC), dengan investasi infrastruktur darurat yang melebihi INR 141 miliar (~US\$1,97 miliar). Sementara itu, anggaran pertahanan China yang lebih besar memungkinkannya untuk lebih mudah menanggung biaya militarisasi, memberi fleksibilitas operasional yang lebih besar. Ketidakseimbangan sumber daya ini memiliki implikasi strategis, terutama karena India juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan keamanan perbatasan dengan modernisasi angkatan laut. Krisis Ladakh telah memperburuk fokus India pada pertahanan darat, yang berpotensi menunda ekspansi angkatan lautnya, yang sangat penting untuk mengimbangi keberadaan China yang berkembang pesat di Samudra Hindia. Perdagangan strategis ini memperumit peran India dalam Indo-Pasifik yang lebih luas dan kemampuannya untuk menyeimbangkan kekuatan China di kawasan tersebut.

Literatur ketujuh adalah artikel yang berjudul **“Strategi India dalam Menghadapi Tiongkok terkait Sengketa Perbatasan di Pegunungan Himalaya Tahun 2020”** yang ditulis oleh Riski Wasiah Aulia Romadani. Dalam artikelnya yang diterbitkan pada tahun 2022. Penulis menjelaskan Konflik perbatasan India-China, terutama di Pegunungan Himalaya, melibatkan aspek geopolitik, militer, dan

ekonomi yang kompleks. India dan China saling memperkuat kekuatan militer dan ekonomi untuk mempertahankan klaim teritorial mereka. Ketegangan meningkat ketika India memperkuat kehadiran militernya di sepanjang Garis Kontrol Aktual (LAC), yang dipandang oleh China sebagai ancaman, memicu perlombaan senjata di kawasan ini. India mengadopsi strategi defensive namun tegas, dengan membangun infrastruktur dan memperkuat Kerjasama dengan AS dan negara-negara QUAD untuk menyeimbangkan pengaruh China. Secara ekonomi, India berusaha mengurangi ketergantungannya pada China melalui pembatasan perdagangan, meskipun hubungan ekonomi tetap bertahan. Di sisi diplomatik, India mengelola ketegangan perbatasan lewat dialog, sambil memperkuat kerjasama internasional. Selain itu penulis menjelaskan bahwa konflik ini juga melibatkan klaim simbolik terhadap wilayah Himalaya yang bernilai tinggi bagi kedua negara, yang memperburuk ketegangan. Secara keseluruhan penulis menyimpulkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan militer, ekonomi, dan dialog yang lebih dalam.

Literatur kedelapan berjudul **“Negotiating the India-China Standoff: 2020-2024”** yang ditulis oleh Saheb Singh Chadha yang diterbitkan pada tahun 2024. Jurnal ini menganalisis ketegangan perbatasan India-China dari 2020 hingga 2024, memfokuskan pada faktor militer, diplomatik, dan geopolitik yang mempengaruhi konflik ini. Jurnal ini membahas fase-fase ketegangan, mulai dari krisis awal setelah bentrokan di Lembah Galwan pada 2020, upaya deeskalasi antara 2020-2022, hingga perkembangan menuju disengagement pada 2024. Mekanisme diplomatik seperti Working Mechanism for Consultation and Coordination (WMCC) dan pertemuan Special Representatives juga menjadi sorotan, meskipun ada hambatan, dan tetap penting dalam mencegah eskalasi. Selain itu, pengaruh hubungan India-AS dan peran domestik nasionalisme juga turut memperburuk ketegangan. Jurnal ini menggunakan pendekatan metode campuran, menggabungkan analisis kualitatif dengan wawancara pemangku kepentingan, memberikan wawasan tentang dinamika negosiasi dan narasi yang digunakan kedua negara. Namun, kekurangannya terletak pada kurangnya perspektif dari masyarakat lokal dan analisis politik domestik yang lebih mendalam. Selain itu, jurnal ini lebih fokus pada perkembangan masa lalu dan

kurang memberikan analisis prediktif mengenai jalannya konflik ke depan. Jurnal ini memberikan cakupan yang komprehensif, membagi ketegangan menjadi fase-fase yang jelas, serta menggunakan beragam sumber untuk meningkatkan kredibilitas. Fokus pada mekanisme diplomatik dan kontekstualisasi geopolitik juga memperkaya analisis ini. Namun, kurangnya perspektif dari tingkat bawah dan minimnya eksplorasi faktor politik domestik menjadi kekurangan utama. Selain itu, jurnal ini tidak memberikan cukup perhatian pada dimensi ekonomi dan analisis prediktif mengenai masa depan konflik ini.

Literatur kesembilan berjudul **“Resent Research on Ladakh: an Introductory Survey”** yang ditulis oleh John Bray pada tahun 1998. Sengketa teritorial di Ladakh, yang berbatasan dengan Pakistan dan China, telah menjadi tema penting dalam penelitian terbaru. Letak strategis Ladakh menjadikannya pusat konflik militer dan politik, yang mempengaruhi identitas lokal dan hubungan antar-komunitas. Setelah menjadi bagian dari India pada 1947, Ladakh menjadi wilayah yang dipersengketakan, dengan ketegangan yang meningkat setelah Perang Sino-India 1962 dan berbagai konflik dengan Pakistan. Sengketa ini memengaruhi kehidupan lokal, dengan marginalisasi politik yang mendorong tuntutan otonomi lebih besar, seperti yang terlihat dalam agitasi 1989 yang dipimpin oleh Ladakh Buddhist Association (LBA). Meskipun pendirian Ladakh Hill Council pada 1995 merupakan upaya untuk meredakan ketegangan, tuntutan akan otonomi lebih besar masih berlanjut. Penelitian banyak fokus pada wilayah yang didominasi oleh Buddhisme, sementara daerah mayoritas Muslim seperti Kargil kurang mendapat perhatian. Selain itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana sengketa ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan hubungan antar-komunitas di Ladakh. Secara keseluruhan, sengketa teritorial di Ladakh memperburuk ketegangan politik dan sosial, dengan dampak yang luas pada identitas dan ekonomi lokal. Penelitian ke depan perlu mencakup perspektif dari seluruh komunitas yang terlibat untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi di Ladakh.

Literatur kesepuluh berjudul **“The India-China Border Dispute: An Indian Perspective”** Artikel yang ditulis oleh Surya P. Sharma, yang diterbitkan dalam *The American Journal of International Law* pada Januari 1965, memberikan analisis hukum dan sejarah tentang sengketa perbatasan India-China dari perspektif

India. Artikel ini mendalami dasar hukum klaim teritorial India, dengan mengacu pada perjanjian-perjanjian sejarah seperti Konvensi Simla 1914 dan Perjanjian Sino-India 1954, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur kedaulatan, akuisisi, dan pencegahan klaim. Penulis juga membahas Garis McMahon dan Sektor Timur, memperjelas argumen India mengenai status Tibet dan keabsahan perjanjian 1914 yang diterima oleh pihak-pihak terkait. Salah satu kekuatan utama artikel ini adalah penjelasan mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum internasional yang mendasari klaim India, seperti pentingnya pengakuan batas yang sudah lama diterima oleh negara-negara yang terlibat. Sharma juga menggabungkan analisis sektor-sektor geografis sengketa perbatasan, memberikan pembaca pemahaman seimbang tentang klaim India dan tantangan yang dihadapi dalam negosiasi. Namun, artikel ini cenderung mengutamakan perspektif India dan kurang mendalami argumen serta pandangan China terkait masalah Tibet dan penerapan Garis McMahon, yang membuatnya sedikit kurang objektif. Artikel ini juga banyak mengandalkan dokumen kolonial yang mungkin kurang relevan dengan perkembangan hukum internasional setelah Perang Dunia II. Selain itu, artikel ini tidak membahas tantangan praktis dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum tersebut di tengah situasi politis dan militer yang kompleks, seperti yang terlihat dalam Perang Sino-India 1962. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami sengketa perbatasan India- China dari sudut pandang hukum internasional. Meskipun menyajikan kerangka yang kuat mengenai klaim teritorial India, artikel ini perlu dilengkapi dengan perspektif yang lebih seimbang untuk memahami sepenuhnya kompleksitas sengketa ini. Artikel ini tetap sangat berharga bagi para ilmuwan hukum, sejarawan, dan pembuat kebijakan yang ingin menggali lebih dalam tentang sengketa teritorial yang telah berlangsung lama ini.

Literatur kesebelas berjudul "**Asymmetry Theory and China- Philippines Relations with the South China Sea as a Case**" yang ditulis oleh Amane Yamazaki dan Suguru Osawa pada tahun 2021. Artikel ini menganalisis bagaimana faktor struktural asimetri memengaruhi hubungan China dengan negara kecil. Seperti yang disarankan oleh studi Brantly Womack, teori asimetri bermanfaat untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan China dengan negara-negara

kecil. Penulis berargumen bahwa analisis hubungan China– Filipina dari tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan bahwa Beijing kesulitan mengelola hubungannya dengan Manila karena asimetri dalam sifat hubungan tersebut, yang berasal dari kesenjangan kekuatan dan status di antara keduanya. Struktur asimetris interaksi bilateral ini cenderung membuat China meremehkan dan mengabaikan niat dan tekad Filipina untuk menentang, yang menjadi sangat jelas dalam sengketa Laut China Selatan. Akibatnya, hubungan mereka mengalami pasang surut berulang kali sepanjang dekade 2010-an, terutama terkait isu kedaulatan maritim. Studi ini juga menyoroti situasi kompleks di sekitar China, di mana banyak negara berukuran sedang dan kecil berusaha bermanuver di antara kekuatan besar. Tanpa hubungan yang baik dengan pemerintah-pemerintah di kawasan Indo-Pasifik, Beijing akan kesulitan mencapai kemajuan damai dan memperoleh status sebagai kekuatan super generasi berikutnya. Secara ringkas, China melihat Filipina sebagai mitra yang lebih kecil yang dapat dipengaruhi, tetapi Filipina bergantung pada aliansinya dengan AS untuk menjaga keamanan. Laut China Selatan tetap menjadi isu utama, dengan kedua belah pihak berusaha mencari cara untuk hidup berdampingan. Kebijakan Filipina telah berubah seiring waktu, dari konfrontasi menjadi keterlibatan ekonomi yang lebih besar, tetapi wilayah tersebut tetap tegang dan kompleks.

Literatur keduabelas berjudul "**Bangladesh's Strategic Hedging towards India and China: Challenges and Options**" yang ditulis oleh Sultan Al Mabruur pada November 2020. Jurnal ini membahas strategi diplomatik Bangladesh dalam menyeimbangkan hubungan dengan dua kekuatan regional utama, yaitu India dan China, dalam konteks dinamika geopolitik dan ekonomi di Asia Selatan. Pendekatan utama yang diadopsi Bangladesh adalah konsep "balancing" berdasarkan teori Neo-Realisme dan Defensive Realism, yang menekankan perlunya negara kecil untuk melindungi kepentingannya melalui hubungan yang hati-hati dan strategis dengan kekuatan besar. Secara ekonomi, Bangladesh menarik investasi dari China melalui proyek infrastruktur dan zona ekonomi khusus, sekaligus memperkuat konektivitas dengan India melalui jalur kereta, air, dan jalan. Dalam bidang pertahanan, kedua negara terlibat dalam pengembangan militer Bangladesh, dengan India memberikan pelatihan dan China

menyediakan kapal selam, menunjukkan upaya Bangladesh untuk menjaga keseimbangan kekuatan militer di kawasan. Hubungan bilateral juga diperkaya melalui kerjasama pembangunan dan budaya, di mana India menjadi mitra utama dalam bidang pinjaman, hibah, dan proyek infrastruktur, sementara China berinvestasi besar dalam pelabuhan, energi, dan infrastruktur lainnya. Meski demikian, terdapat tantangan seperti defisit perdagangan besar dengan China dan ketegangan terkait isu perbatasan dan distribusi air dengan India. Selain itu, Bangladesh berusaha memanfaatkan posisinya sebagai jalur strategis dalam inisiatif Belt and Road (BRI) China dan mengelola kompetisi regional, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui pengadaan vaksin dari kedua negara. Hubungan Bangladesh dengan kedua negara ini diwarnai oleh upaya menjaga keseimbangan, mengingat adanya ketegangan dan persaingan geopolitik di kawasan. Secara keseluruhan, literatur ini menegaskan bahwa Bangladesh menerapkan strategi diplomasi yang hati-hati dan fleksibel, berusaha memaksimalkan manfaat ekonomi dan keamanan dari kedua kekuatan besar sambil menjaga kedaulatan nasionalnya. Pendekatan ini didasarkan pada teori "pilot fish behavior" dan Defensive Realism, yang menunjukkan pentingnya negara kecil untuk tidak terlalu bergantung pada satu kekuatan besar dan tetap menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan semua pihak.

Literatur ketigabelas berjudul "**Sino-Indian rivalry in Indo-Pacific and Bangladesh's geo-strategic hedging in response to its security threats**" yang ditulis oleh Al Amin Oktober 2024. Literatur ini menyoroti strategi diplomasi Bangladesh yang berimbang dan pragmatis dalam menghadapi dinamika geopolitik regional dan global. Bangladesh menerapkan pendekatan hedging, yaitu menjaga hubungan yang seimbang dengan kekuatan besar seperti China dan India, melalui diplomasi yang netral dan diversifikasi kerjasama. Negara ini aktif terlibat dalam proyek infrastruktur besar, termasuk inisiatif Belt and Road China, yang mendukung pembangunan ekonomi dan konektivitas regional, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait utang dan pengaruh geopolitik. Di sisi lain, hubungan dengan India terus berkembang dalam bidang perdagangan, konektivitas, dan pertahanan, meskipun tetap menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan perdagangan dan isu perbatasan. Bangladesh berusaha menjaga kemandirian

strategis dengan memperkuat kerjasama dengan negara lain seperti Jepang dan negara-negara regional, serta menghindari aliansi formal. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa Bangladesh berupaya menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dan keamanan, sambil menjaga stabilitas regional dan kemandirian nasional di tengah ketegangan dan kompetisi kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.